

**DETERMINASI HUBUNGAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG
ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN DEWAN PADA
KEUANGAN DAERAH (APBD)**

(Studi Empiris pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau)

Oleh:

Debby Purnomo

Pembimbing: Desmiyawati dan Pipin Kurnia

Faculty Of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email: purnomodebby@yahoo.co.id

*Determination Of The Board Of Knowledge Relationship With Budget Oversight
Board Of Regional Financial (budget)*

ABSTRACT

This study aims to test the relationship determination of the councilor's knowledge about budget with council's oversight upon regional finance (budget). In this study, researchers examined the relationship of councilor's knowledge about the local finance, on the supervision of local finance as well as using a moderating variable such as accountability, transparency of public policy and community participation and organization commitment, whether it can affect members of the council in monitoring local finances. The problem is whether the council in carrying out its oversight functions over the board due to the knowledge about the budget because council members are generally depart from the political (party) or more caused by other problems. The research sample using purposive sampling which are all members of the provincial council in Riau. The number of respondents of the study was 65 copies, only 55 copies that can be processed. Data analysis was performed using a hypothesis test with the help of SPSS version 20.0. The results proved the relationship between knowledge of the budget with the control panel board in the area affected by the financial accountability, public participation, transparency of public policy and organizational commitment. Therefore this study sported another studies before.

Keywords : *Accountability, Public Participation, Transparancy in Public Policy, Organizational Commitment, and Financial Control Area (budget)*

PENDAHULUAN

Reformasi telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik. Salah satu agenda reformasi tersebut adalah desentralisasi keuangan dan

otonomi daerah. Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah. Masing-masing kedua UU ini telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Selanjutnya kedua UU ini

merupakan tonggak awal pelaksanaan otonomi daerah dan proses awal terjadinya reformasi penganggaran keuangan daerah di Indonesia (Mayasari, 2012).

Desentralisasi keuangan dan otonomi daerah merupakan salah satu agenda dari reformasi. Agar anggaran pemerintah daerah berjalan sesuai rencana dan ketentuan, diperlukan pengawasan yang merata disetiap aspek perencanaan, apakah perencanaan tersebut berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001). Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dilakukan mulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban APBD.

Lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi umum yaitu: (1) fungsi legislatif (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), (2) fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran), dan (3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Penelitian ini akan membahas fungsi dewan dalam pengawasan anggaran mulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan hingga pelaporan dan evaluasi anggaran yang dilakukan lembaga eksekutif. Permasalahannya adalah apakah dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada keuangan daerah (APBD) disebabkan pengetahuan dewan tentang anggaran mengingat anggota

dewan umumnya berangkat dari politik (partai) ataukah lebih disebabkan karena faktor lain. Selain itu, apakah komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik akan mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Adapun fenomena yang telah terjadi saat ini yang dikutip dari website Tribun News, persoalan yang dialami provinsi Riau saat ini, menurut ketua DPRD Riau, Suparman menjadi sorotan perhatian publik, karena Gubernur Riau non-aktif Annas Maamun tersangkut kasus dugaan korupsi. Seperti diketahui, misteri dibalik pengesahan kilat RAPBD tahun 2015 oleh DPRD Riau pada September 2014, terindikasi pemalsuan. Terkuaknya mata anggaran bodong yang disusupkan pada APBD 2015 senilai Rp 10,7 triliun. Berdasarkan temuan Dirjen Keuangan Kemendagri, APBD Riau tahun 2015 diduga dipalsukan setelah ada DPRD Riau yang baru. Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah mencoret alokasi mata anggaran bodong yang disusupkan ke dalam APBD Riau 2015 yaitu sebesar Rp 100 miliar. Hal ini telah terungkap dalam rapat anggaran antara Kemendagri dengan perwakilan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).<http://m.tribunnews.com/regional/2014/12/11/kasus-anggaran-bodong-di-apbd-riau-2015-jadi-perhatian-publik#>

Masalah ini penting untuk diteliti karena melihat fenomena diatas, maka kinerja anggota dewan

pada Provinsi Riau berkurang. Kinerja dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya selalu menjadi perhatian khusus masyarakat karena dipercayakannya amanah pada anggota dewan untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, kepercayaan tersebut sekarang ini cenderung berkurang bahkan banyak yang tidak mempercayai kinerja dewan, hal ini disebabkan karena kinerja dewan yang kurang optimal dan belum ada komitmen organisasi yang kuat dari para anggota dewan. Sikap ketidakpercayaan inilah yang memotivasi penelitian ini dilakukan. Penelitian juga diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) dan apakah komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: 1). Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) ?. 2). Apakah akuntabilitas akan berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) ?. 3). Apakah partisipasi masyarakat akan berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan

pada keuangan daerah (APBD) ?. 4). Apakah transparansi kebijakan publik akan berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) ?

Berkaitan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1). Menguji apakah pengetahuan dewan tentang anggaran akan mempengaruhi dewan dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). 2). Menguji apakah akuntabilitas akan mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). 3). Menguji apakah partisipasi masyarakat akan mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). 4). Menguji apakah transparansi kebijakan publik akan mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). 5). Menguji apakah komitmen organisasi akan mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah: 1). Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literature akuntansi sektor publik (ASP) terutama pengembangan sistem pengendalian

manajemen di sektor publik. Selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lain. 2). Bagi pemerintah daerah diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya akan meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan anggaran (APBD) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*) dan. 3). Bagi partai politik dapat dijadikan sebagai acuan pada saat merekrut anggota dewan dan pengembangan kader partai.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengawasan Keuangan Daerah

Secara umum pengawasan merupakan segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Abdul (2002) pengertian pengawasan APBD dirumuskan sebagai berikut: "Pengawasan APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan pendapatan daerah, dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan

Pengetahuan Dewan

Pengetahuan dewan tentang anggaran yaitu mengetahui tentang anggaran dan kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran (Yudoyono, 2002). Kemampuan kerja aparatur memiliki

hubungan yang sangat erat dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan keahliannya. Oleh sebab itu, peningkatan kemampuan aparatur selalu diarahkan pada pendidikan dan pelatihan serta memperluas pengalaman aparatur melalui studi banding ke tempat lain.

Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

Yudono (2002) mengatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik, dan lain sebagainya. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Uraian di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isma (2007) tentang akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Sehingga dapat

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengawasan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)

Akuntabilitas Terhadap Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah

Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi ini dimana anggota dewan berpengaruh dalam setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Anggota dewan dalam legislatif perlu mengerti dan memahami pedoman akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat menjalankan fungsinya dalam mengawasi tahapan penyusunan hingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kegagalan dalam menerapkan standar operasional prosedur akuntabilitas mengakibatkan pemborosan waktu, pemborosan sumber dana dan sumber-sumber daya yang lain, penyimpangan kewenangan dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintahan (Pramita dan Andriyani 2010). Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dimoderating oleh akuntabilitas

Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Isma (2007) tentang akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Dari hasil penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa partisipasi mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.

Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai sumber energi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi diharapkan partisipasi masyarakat akan meningkatkan hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.

H3: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dimoderating oleh partisipasi masyarakat

Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Isma (2007) tentang akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Dari hasil penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut penulis asumsinya semakin transparan kebijakan publik yang dalam hal ini adalah APBD maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut. Sehingga hipotesis penelitiannya adalah:

H4: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dimoderating oleh transparansi kebijakan publik

Komitmen Organisasi Terhadap Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah

Pada konteks pengawasan dewan terhadap keuangan daerah (APBD), dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran menjadi relatif lebih tepat dan baik. Komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan (Nouri dan Parker, 1996; McClurg, 1999; Chong dan Chong, 2002; Wentzel, 2002 dalam Suhartono (2006)). Jadi, psikologi dewan dapat tercermin dari komitmen organisasi yang benar-benar dilakukan oleh seorang dewan sebagai wakil rakyat. Komitmen organisasi dewan sangat penting mengingat anggota dewan umumnya berangkat dari politik (partai). Hal tersebut bisa jadi memperkuat atau memperlemah hubungan antara

pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Pada konteks kinerja dewan di DPRD, komitmen organisasi dalam era reformasi dan demokrasi seperti sekarang ini dalam sangat perlu dimiliki.

H5: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dimoderating oleh komitmen organisasi

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Provinsi Riau. Sampel penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Provinsi Riau. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Jenis pengumpulan data primer. Teknik menggunakan instrumen kuesioner.

Data primer merupakan salah satu teknik pengambilan data secara langsung dengan menggunakan media kuesioner dengan cara penyampaian kuesioner secara langsung kepada anggota DPRD Provinsi Riau. Daftar pertanyaan (kuesioner) dalam penelitian ini menggunakan penelitian Pramita dan Andryani (2010) yang kemudian peneliti mengembangkan lagi disesuaikan dengan situasi dan teori terkait.

Metode analisis data penelitian ini menggunakan *Multiple Regression Analysis* (MRA). Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_1 X_2 + \beta_3 X_1 X_3 + \beta_4 X_1 X_4 + \beta_5 X_1 X_5 + e$$

Y = Pengawasan (APBD)
a = Konstanta
X1 = Pengetahuan dewan tentang anggaran
X1X2 = Interaksi antara X1 dan X2
X1X3 = Interaksi antara X1 dan X3
X1X4 = Interaksi antara X1 dan X4
X1X5 = Interaksi antara X1 dan X5
e = error

Definisi Operasional

Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan yang dimulai dari tahap penyusunan anggaran, pengesahan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran (APBD). Indikator indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengawasan keuangan mengacu pada penelitian Pramita dan Andriyani (2010).

Pengetahuan Dewan

Pengetahuan yang dimiliki oleh anggota dewan digunakan untuk mengawasi pelaksanaan APBD oleh pihak eksekutif, pengetahuan mengenai teknis penyusunan APBD yang dapat membantu anggota dewan dalam hal penyusunan, pelaksanaan, pelaporan serta dapat mengevaluasi APBD. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan ini mengacu pada penelitian Pramita dan Andriyani (2010).

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban yang dimiliki oleh pihak pemegang amanah (dewan) untuk dapat mempertanggungjawabkan,

menyajikan laporan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah (masyarakat) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Coryanata, 2007). Indikator-indikator dalam pengukuran variabel akuntabilitas menganut prinsip penyusunan LAKIP. Skala yang digunakan adalah skala likert 1 sampai dengan 5 poin.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penyusunan anggaran yang dilakukan oleh anggota dewan beserta pihak eksekutif mulai pada saat penyusunan anggaran, kebijakan serta penentuan strategi arah dari kebijakan yang akan dijalankan. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel partisipasi masyarakat mengacu pada penelitian Pramita dan Andriyani (2010).

Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi kebijakan publik adalah keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel transparansi kebijakan publik mengacu pada penelitian Pramita dan Indriyani (2010).

Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja,

dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai tujuan organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi (Pramita dan Andriyani, 2010).

Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif atau statistic deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, nilai minimum dan nilai maksimum (Ghozali, 2009). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada anggota DPRD Povinsi Riau. Sebanyak 65 kuesioner yang akan disebarakan ke DPRD Provinsi Riau.

Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan pengujian hipotesis secara parsial digunakan Uji t. Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, dan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki hubungan signifikan/tidak dengan variabel terikat secara individual untuk setiap variabel. Dasar pengambilan keputusan pengujian adalah :

1. jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak ada pengaruh yang signifikan), atau apabila tingkat sig > 0,05 maka secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap variabel dependen.

2. jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (ada pengaruh yang signifikan), T tabel dilihat dengan derajat bebas = $n - k - 1$, atau apabila tingkat sig < 0,05 maka secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN

Uji Validitas

Pengujian validitas yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan *pearson correlation*. Dapat dikatakan valid apabila korelasi antara masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05 (5%), dan sebaliknya bila nilai signifikansi diatas 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa *item* pertanyaan tersebut tidak valid. Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor *item* dengan skor total tanpa melakukan koreksi terhadap *spurious overlap* (nilai koefisien korelasi overestimasi). Skor total *item* adalah penjumlahan dari keseluruhan *item* (Priyatno, 2012). Nilai korelasi (*r* hitung) dibandingkan dengan *r* tabel, *r* tabel dicari pada signifikan 0,05 dengan jumlah data (n) = 55 maka dapat *r* tabel sebesar 0,266. Berdasarkan hasil uji dikatakan bahwa semua hasil uji setiap *item* variabel dinyatakan valid, valid berdasarkan perbandingan *r* hitung dan *r* tabel terlihat pada tabel semua *item* variabel memiliki nilai *r* hitung > *r* tabel.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner yang reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011). Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat koefisien *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Berdasarkan dari hasil reliabilitas dapat dilihat tingkat koefisien alpha untuk semua variabel dalam penelitian ini memiliki *croncbach's alpha* > 0,60 sehingga dapat disimpulkan semua variabel dalam penelitian ini reliabel.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi data mengikuti atau mendekati distribusi normal, data yang baik adalah data yang pola distribusinya normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan metode *Kolmogorof-Smirnov test*, dengan melihat nilai signifikansi yang dihasilkan >0,05 maka berdistribusi normal.

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		55
Normal	Mean	0E-7
Parameters ^{ab}	Std. Deviation	4.41588261
	Absolute	.121
Most Extreme Differences	Positive	.121
	Negative	-.076
Kolmogorov-Smirnov Z		.900
Asymp. Sig. (2-tailed)		.392

Sumber : Data hasil penelitian tahun 2015

Dari tabel diatas diperoleh *Asymptotic Significances* sebesar $0,392 > 0,05$. Dengan demikian maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Heterokedastisitas

Jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai alpha ($\text{sig} > \alpha 0,05$), maka dapat dipastikan model tidak mengandung gejala heterokedastisitas atau dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas.

Gambar 2
Hasil Uji Heterokedastisitas
Coefficients^a

Model	t	Sig.
(Constant)	-1.770	.083
1		
pengetahuan dewan	1.699	.096
akuntabilitas	1.146	.258
partisipasi masyarakat	-.545	.589
transparansi	.452	.654
komitmen organisasi	.729	.470
interaksi X1*X2	-1.128	.265
interaksi X1*X3	.566	.574
interaksi X1*X4	-.425	.673
interaksi X1*X5	-.784	.437

Sumber : Data hasil penelitian tahun 2015

Dapat dilihat bahwa semua variabel bebas memiliki tingkat signifikan $> \alpha 0,05$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heterokedastisitas.

Uji Multikolineritas

Gambar 3
Hasil Uji Multikolineritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1		
pengetahuan dewan	.725	1.380
akuntabilitas	.738	1.354
partisipasi masyarakat	.835	1.197
transparansi	.326	3.067
komitmen organisasi	.339	2.950

Sumber : Data hasil penelitian tahun 2015

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF yang kurang dari 10, maka dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Watson (DW). Jika angka DW dibawah -2, maka terdapat autokorelasi positif. Jika angka DW diantara -2 sampai +2, maka tidak terdapat autokorelasi.

Gambar 4
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin - Watson
1	.597 ^a	.357	.291	4.63571	1.648

Sumber : Data hasil penelitian tahun 2015

Berdasarkan hasil diatas diketahui nilai d_{hitung} (Durbin Watson) terletak antara $-2 < 1,648 < 2$. Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi.

Uji Hipotesis (t-test)

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Patokan yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai signifikan yang dihasilkan dengan alpha 0,05 atau dengan membandingkan thitung dengan ttabel. Nilai ttabel dengan $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas (db) = $n-k-1 = 55 - 5 - 1 = 49$ adalah 2.004. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen

secara parsial terhadap variabel dependen pada uraian berikut ini :

a. Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dan t tabel. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha$ 0,05. Nilai ttabel pada α 0,05 adalah 2.004. Untuk variabel Pengetahuan dewan tentang anggaran (X1) nilai t hitung adalah 4.269 dan nilai sig adalah 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4.269 > 2.004$ atau nilai signifikansi $0,000 < \alpha$ 0,05. Nilai koefisien β dari variabel X1 bernilai negatif yaitu 0,422. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran (X1) berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengawasan keuangan daerah, sehingga hipotesis pertama dari penelitian ini diterima.

b. Pengujian Hipotesis 2

Hasil analisis berikutnya, diperoleh nilai signifikan X1.X2 sebagai variabel interaksi antara variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dan akuntabilitas sebesar 0,011 nilai ini lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,011 < 0,05$) dan nilai t hitung $> t_{tabel}$ $2.637 > 2.004$ dan koefisiennya β 0,068. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua penelitian ini diterima.

c. Pengujian Hipotesis 3

Hasil analisis pada lampiran selanjutnya, diperoleh nilai signifikan $X1.X3$ sebagai variabel interaksi antara variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat sebesar 0,000 nilai ini lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,001 < 0,05$) dan nilai t hitung $> t$ tabel $3.900 > 2.004$ dan koefisiennya 0,101. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima.

d. Pengujian Hipotesis 4

Hasil analisis pada lampiran selanjutnya, diperoleh nilai signifikan $X1.X4$ sebagai variabel interaksi antara variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik sebesar 0,008 nilai ini lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,008 < 0,05$) dan nilai t hitung $> t$ tabel $2.767 > 2.004$ dan koefisiennya 0,133. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat diterima.

e. Pengujian Hipotesis 5

Hasil analisis pada lampiran selanjutnya, diperoleh nilai signifikan $X1.X5$ sebagai variabel interaksi antara variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dan

komitmen organisasi sebesar 0,025 nilai ini lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,025 < 0,05$) dan nilai t hitung $> t$ tabel $2.309 > 2.004$ dan koefisiennya 0,063. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima diterima.

Hasil Uji Determinasi

Hasil analisis determinasi dapat dilihat pada output *Model Summary* dari hasil analisis regresi linier berganda dibawah ini :

Gambar 5
Hasil Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.701 ^a	.492	.390	4.30000

Sumber : Data hasil penelitian tahun 2015

Hasil uji analisis pada tabel 4.19 diperoleh nilai R Adjusted Square sebesar 0.492 atau 49.2%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen dan moderating yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan komitmen organisasi terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) sebesar 49.2%. dengan kata lain nilai tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel bebas hanya mempengaruhi 49.2% variabel terikat. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan pada keuangan daerah (APBD), dengan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating, sampel adalah seluruh anggota DPRD Provinsi Riau. Sebanyak 65 kuesioner yang disebar, hanya 55 kuesioner yang dapat diolah. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian regresi pertama atas pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) menunjukkan pengaruh yang signifikan.
2. Hasil pengujian regresi berganda kedua menunjukkan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan pada keuangan daerah (APBD) yang dimoderasi oleh akuntabilitas.
3. Hasil pengujian regresi berganda ketiga menunjukkan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan pada keuangan daerah (APBD) yang dimoderasi oleh partisipasi masyarakat.

4. Hasil pengujian regresi berganda ketiga menunjukkan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan pada keuangan daerah (APBD) yang dimoderasi oleh transparansi kebijakan publik.
5. Hasil pengujian regresi berganda ketiga menunjukkan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan pada keuangan daerah (APBD) yang dimoderasi oleh komitmen organisasi.

Keterbatasan

Meskipun penelitian ini telah selesai dilaksanakan tetapi penelitian ini memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada anggota DPRD Provinsi Riau, sedangkan yang berhubungan tentang anggaran tidak hanya DPRD saja, Badan Pemerintah Daerah (BAPEDA) atau lembaga eksekutif lainnya yang berkaitan dengan anggaran karena dalam dalam penyusunan anggaran dilakukan oleh BAPEDA.
2. Responden yang seharusnya berjumlah 65 orang, karena kesibukan anggota dewan, maka responden yang datanya bisa diolah hanya berjumlah 55 orang.

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mempertimbangkan beberapa kriteria lain, seperti gaya kepemimpinan, komitmen politik, pengambilan keputusan yang sekiranya dapat mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan pada keuangan daerah (APBD).
2. Bagi peneliti selanjutnya agar memperluas sampel dan wilayah penelitian sehingga dapat mengembangkan penelitian sebelumnya.
3. Penelitian ini hanya menggunakan metode survey kuesioner, kedepannya agar menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara tatap muka terhadap setiap anggota dewan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik.
4. Untuk anggota dewan sebaiknya menjalankan fungsi dan tugasnya dengan maksimal sebagai wakil rakyat dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah. Pelaksanaan pemerintahan daerah dapat berjalan lancar jika didukung oleh pengawasan keuangan daerah.
5. Bagi pemerintah baik eksekutif maupun legislatif diharapkan meningkatkan kinerjanya dalam hal perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan khususnya kebijakan tentang anggaran sehingga akan meningkatkan tingkat pengawasan anggaran.
6. Untuk masyarakat khususnya masyarakat Provinsi Riau, agar dapat terus memantau, mengawasi kinerja anggota DPRD Provinsi Riau serta ikut berpartisipasi dalam hal meningkatkan kualitas Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, 2002, *Pengaruh Pengetahuan RPPs terhadap peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran (Studi Kasus pada DPRD se-Propinsi Bengkulu*, Tesis Program Pasca Sarjana UGM, Jogjakarta.
- Amalia, Nurul Fitri. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah
- Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Mayasari, Rosalina Pebrica. 2012. Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD Dengan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*

- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:ANDI
- Pramono, Agus H; 2002, *Pengawasan Legislatif Terhadap Eksekutif Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Tesis S2 Tidak Di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya, Malang.
- Pramita, Yulinda devi dan Lilik Andriyani. 2010. "Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu)". Dalam *Prosiding SNA XIII*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Sopannah dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah
- Sardjito. 2007. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah: budaya organisasi dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating dikantor Pemerintahan Kota dan Kabupaten Semarang
- Suhartono, Ehrmann dan Mochammad Solichin. 2006. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*.
- Winarna, Jaka dan Murni, Sri. 2007. "Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006)". Dalam *Prosiding SNA X*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret

<http://saptawibbawa.blogspot.com/2012/08/pengertian-keuangan-daerah.html?m=1>

http://www.rri.co.id/post/berita/134143/daerah/ketua_dprd_riau_klaim_tidak_tahu_kasus_suap_apbd_riau.html

<http://luckyarezo.blogspot.com/2013/05/prinsip-transparansi-akuntabilitas-dan.html>

<http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela3.htm>